

SKRIPSI

**PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA PANAS BUMI DI SOLOK SELATAN**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka
memperoleh gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

JULFAHMI SYAHPUTRA
2010112021

Program Kekhususan : Hukum Agraria Dan Sumber Daya Alam (PK VII)

Pembimbing :

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum
Dr. Anton Rosari, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : II/PK-VII/III/2024

ABSTRAK

Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat menjadi sebuah keniscayaan. Salah satu sumber daya aman yang dapat dimanfaatkan dan memiliki potensi yang besar yaitu panas bumi. Namun dalam pemanfaatannya, memerlukan kebutuhan atas tanah. Dalam memenuhi kebutuhan atas tanah dapat dilalui dengan mekanisme pengadaan tanah. Penggunaan skema ini menciptakan berbagai bentuk sengketa seperti kepemilikan ganda, pengakuan sepihak yang menyatakan bahwa lahan nya telah dibebaskan namun belum mendapatkan kompensasi ganti rugi, dan penolakan pemberian lahan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di solok selatan?, (2) Bagaimana proses ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Solok Selatan?, (3) Bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di solok selatan?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis proses pengadaan tanah, ganti kerugian dan penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Solok Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian ini merujuk kepada pengadaan tanah untuk perusahaan panas bumi di Solok Selatan diawali dengan pemberitahuan informasi kepada masyarakat terkait dengan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi dan konsultasi publik. Pada proses jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan dilaksanakan dengan mekanisme dan skema ganti rugi yang ditetapkan oleh panitia yang dibentuk oleh perusahaan selanjutnya akan disampaikan dan ditetapkan dalam musyawarah. Pada tahapan pemberian ganti rugi menggunakan metode pemberian uang atau tanah pengganti. Sengketa yang timbul dalam pengadaan tanah ini disebabkan oleh kepemilikan ganda, pengakuan sepihak yang menyatakan bahwa lahan nya telah dibebaskan namun belum mendapatkan kompensasi ganti rugi, dan penolakan pemberian lahan. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pemenuhan kebutuhan akan tanah yang dilaksanakan oleh PT Supreme Energy Muara Laboh merujuk kepada Perpres No 36 Tahun 2005 Perpres 36 Tahun 2006 dan RTRW Kabupaten Solok Selatan. Disamping itu dalam hal pelaksanaan proses jual beli yang dilaksanakan oleh PT Supreme Energy Muara Laboh melalui mekanisme ganti rugi yang penyebutan skema yang dibuat yaitu “ganti untung” yang dihadirkan oleh perusahaan tersebut. Adapun penyelesaian sengketa mengedepankan penyelesaian diluar pengadilan dengan pendekatan sosialisasi dan apabila tidak mendapatkan titik temu akan diselesaikan melalui jalur hukum. Atas hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan untuk melaksanakan kolaborasi dengan masyarakat terhadap pelaksanaan pengadaan tanah baik pada proses perencanaan, proses penilaian dalam ganti rugi hingga penyelesaian baik melalui mediasi atau hingga di pengadilan.

Kata kunci: Ganti Rugi, Pengadaan Tanah, Panas Bumi.